



KABUPATEN LUWU TIMUR

RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN
2021

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Luwu Timur. Rencana Kerja (Renja) merupakan hal yang sangat penting guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah agar berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini.

Malili, 2020

 Kepala BPKD


 **Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM**
Pkt : Pembina Tk I
Nip : 19700814 200212 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD	18
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BKPD	40
3.2 Program dan Kegiatan BPKD	41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH	55
------------------------------	-----------

BAB V PENUTUP	58
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

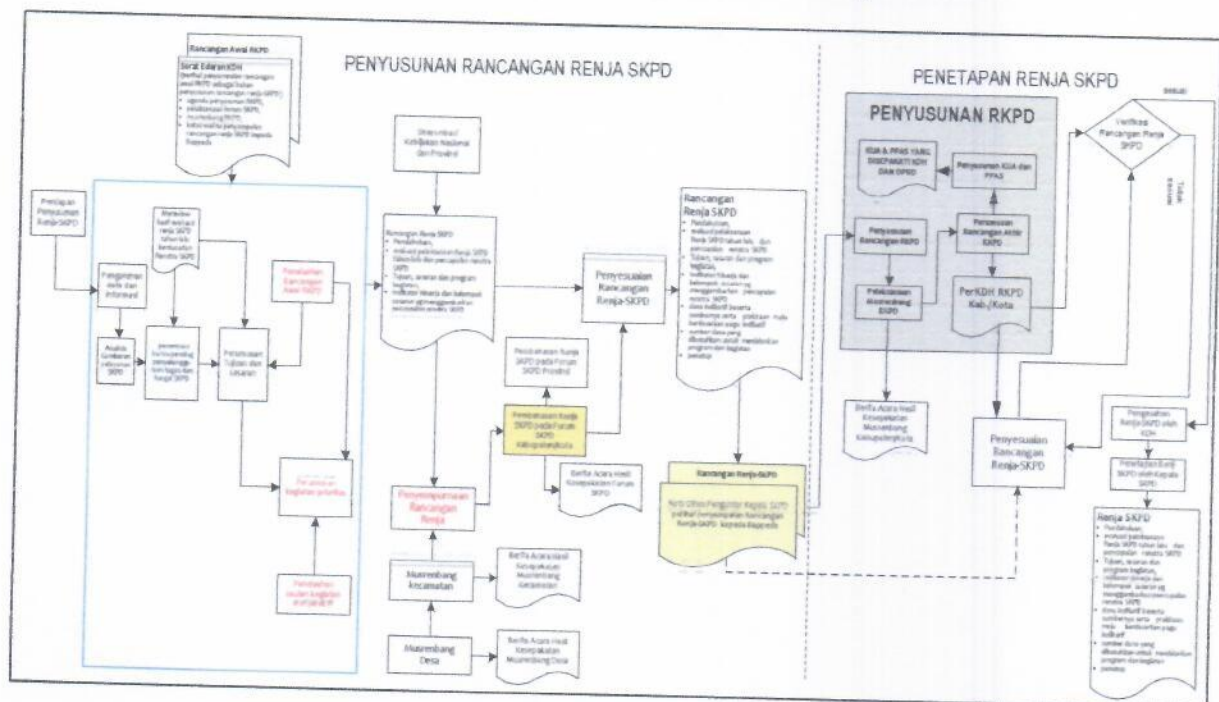
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu SKPD yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 yaitu “ **Luwu Timur Terkemuka 2021**”.

Renja SKPD memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran Rencana Kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan RKPD sebagai salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Dokumen rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, dimana memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi RPJMD yang ditetapkan dalam beberapa misi SKPD yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD



1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoma Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 -2021(lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016- – 2021.
9. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- b) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- c) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- d) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- e) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

- f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BPKD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BPKD, rencana Kerja BPKD, keterkaitan antara Renja BPKD dengan Dokumen RKPD dan Renstra BPKD

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BPKD Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKD, serta susunan garis besar isi dokumen setiap BAB beserta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja BPKD Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu dan Capain Renstra BPKD,

Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BPKD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD

Menjelaskan dan menyajikan Hasil Analisa Kinerja pelayanan BPKD serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebut

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2020 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BPKD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD

Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD

3.3 Program dan Kegiatan BPKD

Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BPKD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKD

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Secara umum evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renja BPKD), dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dan sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD, untuk kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2020. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan tahun 2019 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Luwu Timur

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*
									11=(10/4)x100%
	Belanja Tidak Langsung				46 Pegawai	46 Pegawai	100%	44 Pegawai	100%
	Belanja Langsung								
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran	98%	98%	98%	98%	100%	98%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	24970	0	2550	2550	100%	2550	5100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (rekening)	180	4	49	46	94%	48	98
									20
									54

						97		95	95	100%	97	192	198
					Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah	Persentase pendistribusian anggaran yang bersumber dari pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah							
					Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Jumlah regulasi pendapatan daerah	17	8	9	113%	8	17	100
					Optimalisasi penyelesaian pendapatan daerah	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terselesaikan	85	85	85	100%	85	170	200
					Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset/Barang milik daerah	Persentase tecapainya Pengelolaan dan Pemanfaatan aset daerah	98%	98%	98%	100%	98%	98%	100%
					Kegiatan Penghapusan, penindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aset daerah yang di manfaatkan atau dihapus (dok)	5	0	0	0%	0	0	0
					Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Aset/Barang milik daerah yang diadakan (aplikasi)	1	0	0	0%	0	0	0
					Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang ditatausahakan dengan baik	100	100	100	100%	0	0	0
					Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah (dok)	15	0	0	0%	0	3	20
					Kegiatan Penyusunan Perda tentang barang milik daerah	Jumlah Dokumen Perda (dok)	1	0	0	0%	0	1	100
					Program Pengelolaan dBarang milik daerah	Cakupan Persentase BMD yang dikelola dengan baik	90%	0%	0%	0%	85%	85%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 pada Misi 6 yaitu **mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik** dengan tujuan menguatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik dan sasarannya meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja opini laporan keuangan, maka dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkannya 3 (tiga) program pada RPJMD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan kedudukan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPKD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis Pendapatan daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
3. Merumuskan Kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Mengkoordinasikan penyusunan dan tugas pembinaan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Dari tugas dan fungsi BPKD dimaksud, secara rinci jenis pelayanan yang diberikan, meliputi :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pajak Daerah;
2. Melaksanakan proses perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian pengelolaan Keuangan Daerah secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maupun secara horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Melaksanakan Penatausahaan Aset Daerah;
5. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi Keuangan Daerah
6. Memberikan informasi dan Data potensi Keuangan Daerah.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	97%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	62,95

Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Capaian Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan dan Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam tahun-tahun yang lalu mempunyai arah kebijakan yang akan diambil dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi :

1. Kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendasarkan pada aturan yang berlaku dalam proses penyusunan maupun pertanggungjawaban APBD ;
2. Kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah ;
3. Kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah dan ;
4. Kebijakan pengembangan aparatur.

Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 1 (satu) Tujuan dengan 2 (dua) sasaran yang ditetapkan.

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	89,00%	92,00%	94,00%	95,00%	97,00%

Analisis Kinerja Pelayanan badan yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaran SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	89,00%	92,00%	94,00%	95,00%	97,00%	97,00%	97,00%

Realisasi Pendapatan Tahun 2015-2019

TAHUN	REALISASI
2015	Rp.1.106.423.416.449,25
2016	Rp.1.414.058.832.306,66
2017	Rp.1.365.172.782.139,53
2018	Rp.1.466.152.959.823,12
2019	Rp.1.513.976.802.499,03

Sumber Data : Audited BPK RI

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi pendapatan untuk lima tahun terakhir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, terus mengalami peningkatan dimana tingkat pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir sebesar 8,16 %.

Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Tahun 2019

1	Pendapatan	%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	20,71
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	53,72
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1,34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	36,58
1.2	Dana Perimbangan	55,11
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	13,92
1.2.2	Dana Alokasi Umum	66,87
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	19,21
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20,66
1.3.1	Pendapatan Hibah	10,20
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	39,72
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50,07

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase proporsi tertinggi dalam Realisasi Pendapatan terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 55,11 Persen pada pos Dana Alokasi Umum sebesar 66,87 persen. sedangkan yang terendah ada pada Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang prosentasenya sebesar 20,66 Persen hanya sedikit lebih kecil dibanding Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,71%.

Realisasi Belanja Tahun 2015-2019

TAHUN	REALISASI
2015	Rp.1.185.958.025.904,81
2016	Rp.1.374.892.757.226,31
2017	Rp.1.416.274.050.915,24
2018	Rp.1.520.109.440.833,57
2019	Rp.1.520.299.657.280,14

Sumber Data : Audited BPK RI

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi belanja untuk lima tahun terakhir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, terus mengalami peningkatan dimana tingkat pertumbuhan rata-rata realisasi belanja selama lima tahun terakhir sebesar 6,41 %.

Persentase Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2019

2	Belanja	%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	43,72
2.1.1	Belanja Pegawai	62,20
2.1.2	Belanja Hibah	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	3,76
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2,34
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2,11
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	0,00
2.2	Belanja Langsung	56,28
2.2.1	Belanja Pegawai	0,23
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,34
2.2.3	Belanja Modal	39,43

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase proporsi realisasi belanja terbesar terdapat pada belanja langsung 56,28% sedangkan belanja tidak langsung sebesar 43,72%.

Realisasi Surplus /(Defisit) Tahun 2015-2019

TAHUN	REALISASI
2015	Rp. (79.534.609.455,56)
2016	Rp. 39.166.075.080,35
2017	Rp. (51.101.268.775,71)
2018	Rp. (53.956.481.010,45)
2019	Rp. (6.322.854.781,10)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2014-2018

Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pembiayaan	224.932.548.731,07	116.897.939.275,51	156.064.014.355,86	104.961.418.960,15	47.504.937.949,70
Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000,-	0,00-	0,00-	3.500.000.000,00	15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	196.432.548.731,07	116.897.939.275,51	156.064.014.355,86	101.461.418.960,15	32.504.937.949,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	116.897.939.275,51	156.064.014.355,86	104.962.745.580,15	47.504.937.949,70	26.182.083.168,60

Sumber Data : Audited BPK RI

Persentase Pertumbuhan Surplus/(Defisit), Pembiayaan dan SILPA Tahun 2015-2019

Surplus/(Defisit)	Pembiayaan Netto	SILPA
(46,90%)	(36,22%)	(31,21%)
Total Rata-rata Pertumbuhan : (12,69%)		

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi surplus/(defisit), ,Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenanan (SILPA). Dalam lima tahun terakhir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dimana Surplus/(defisit) mengalami pertumbuhan minus 46,90 persen, Pembiayaan Netto mengalami pertumbuhan 36,22 persen dan SILPA menurun rata-rata Minus 31,21 persen sehingga bisa didapatkan total rata-rata pertumbuhan turun sebesar minus 12,69 persen. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan Daerah selama lima tahun terakhir sangat optimal dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peletakan Defisit dan Pengelolaan Pembiayaan dan SILPA untuk menjaga keseimbangan Primer dalam Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2019

TAHUN	OPINI
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Opini BPK RI

Dari tabel diatas dapat dilihat Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 Opini atas Laporan Keuangan mendapatkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini membuktikan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipaparkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKD yang diamanatkan telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	92,00 %	94,00 %	95,00 %	97,00 %	92,00 %	96,00 %	97,00 %	98,00 %	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan BPKD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan BPKD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra BPKD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BPKD.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a. Masih diperlukan upaya progresif untuk lebih mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk tahun kedepan;
- b. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik memerlukan SDM yang berkompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk menunjang secara maksimal sistim informasi keuangan daerah.
- d. Perlunya efektifitas dalam penyusunan Rancangan APBD, penatausahaan keuangan dan Laporan Keuangan.
- e. Perlunya penyesuaian dan menyiapkan anggaran yang terkait dengan penanganan COVID 19.
- f. Perlunya peningkatan kemampuan Pengurus barang dan penyimpan barang dalam pengelolaan barang milik daerah. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD perlu dilakukan review setiap tahun. Adapun gambaran review terhadap rancangan awal Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKD	Presentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terpenuhi	98%	1,745,951,800	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKD	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terpenuhi	98%	1,740,231,800	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKD	Jumlah Surat Yang Masuk dan Surat Keluar Yang Diaganda	2550 Surat	16,690,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKD	Jumlah Surat Yang Masuk dan Keluar yang Di Agenda	2550 Surat	16,690,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	SKPD Jumlah Rekening Listrik, Telpn dan Air yang Di Bayarkan Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, SDA, Dan Sumber Listrik Yang Terbayarkan	48 Rekening	227,220,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah Rekening Listrik, telpon dan air yang di bayarkan Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	48 Rekening	227,220,000	
3											
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKD	Jumlah Upah Tenaga Pembersih Yang Terbayar Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Terbayarkan	2 orang	32.625,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKD	Jumlah Upah Tenaga Pembersih Yang Terbayar Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Terbayarkan	2 orang	32.625,000	
4	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPKD	Jumlah Peralatan Yang Terpelihara Dengan Baik	69 Unit	88,250,000	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BPKD	Jumlah Peralatan Yang Terpelihara Dengan Baik	69 Unit	88,250,000	

Rencana Kerja BPKD Kab. Luwu Timur Tahun 2021

12	Monitoring Dan Evaluasi	BPKD	Teknis Yang Terbayarkan Jumlah Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Yang Terlaksana Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Triwulan Yang Disusun	4 Dokumen	8,637,000	Monitoring Dan Evaluasi	BPKD	Teknis Yang Terbayarkan Jumlah Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Yang Terlaksana Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Triwulan Yang Disusun	4 Dokumen	8,637,000		
13	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	BPKD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	275 Kali	59,610,000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	BPKD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	275 Kali	29,890,000		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKD	Presentase Rata-Rata Capaian Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Terpenuhi	95%	1,062,350,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKD	Presentase Rata-Rata Capaian Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Terpenuhi	95%	1,042,350,000		
14	Pembangunan Gedung Kantor	BPKD	Jumlah Gedung kantor yang dibangun Jumlah Penambahan Gedung Yang Dilaksanakan	0	0	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung kantor yang dibangun Jumlah Penambahan Gedung Yang Dilaksanakan	0	0		
15	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan	0	0		
16	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	5 Unit	3,900,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	5 Unit	3,900,000		
17	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	BPKD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang diadakan Jumlah peralatan	24 Unit	361,700,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	BPKD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang diadakan Jumlah peralatan	24 Unit	341,700,000		

18	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	BPKD	Kantor yang Diadakan Jumlah Taman/Lapangan /Fasilitas Parkir Yang Dibangun Jumlah Fasilitas Kantor Yang Terpelihara	1 paket	498,750,000	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	BPKD	Kantor yang Diadakan Jumlah Taman/Lapangan /Fasilitas Parkir Yang Dibangun Jumlah Fasilitas Kantor Yang Terpelihara	1 paket	498,750,000		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKD	Kantor Gedung Yang Dipelihara Jumlah Gedung Yang Terpelihara	2 Unit	100,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKD	Kantor Gedung Yang Dipelihara Jumlah Gedung Yang Terpelihara	2 Unit	100,000,000		
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Kantor Dinas Operasional Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara dengan baik	23 unit	98,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Kantor Dinas Operasional Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara dengan baik	23 unit	98,000,000		
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	BPKD	Kantor Gedung Yang Direhabilitasi	0	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	BPKD	Kantor Gedung Yang Direhabilitasi	0	0		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BPKD	Kantor Gedung Yang Direhabilitasi	98%	0	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BPKD	Kantor Gedung Yang Direhabilitasi	98%	0		
22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKD	Kantor Gedung Yang Direhabilitasi	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKD	Kantor Gedung Yang Direhabilitasi	0	0		
23	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	BPKD	Kantor Gedung Yang Direhabilitasi	0	0	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	BPKD	Kantor Gedung Yang Direhabilitasi	0	0		

28	Pemerintah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	BPKD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Yang Disusun	3 Dokumen	10,000,000	Pemerintah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	BPKD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Yang Disusun	3 Dokumen	10,000,000	
7	Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan daerah	BPKD	Presentase Jumlah Penerimaan Daerah Yang Di Hasilkan	97%	2,000,254,400	Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan daerah	BPKD	Presentase Jumlah Penerimaan Daerah Yang Di Hasilkan	97%	2,000,254,400	
29	Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan perkotaan (PBB P2)	BPKD	Jumlah Objek pajak PBB P2 yang Di tetapkan	142661 Objek pajak	1,311,383,750	Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan perkotaan (PBB P2)	BPKD	Jumlah Objek pajak PBB P2 yang Di tetapkan	142661 Objek pajak	1,311,383,750	
30	Optimalisasi penerimaan pajak Daerah, dana Transfer dan Lain- lain pendapatan daerah	BPKD	Persentase pendistribusian anggota yang bersumber dari pajak daerah, dan transfer dan lain- lain pendapatan daerah kedalam dokumen DPA	97%	395,005,650	Optimalisasi penerimaan pajak Daerah, dana Transfer dan Lain- lain pendapatan daerah	BPKD	Persentase pendistribusian anggota yang bersumber dari pajak daerah, dan transfer dan lain- lain pendapatan daerah kedalam dokumen DPA	97%	395,005,650	
31	Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah	BPKD	Jumlah Regulasi pendapatan daerah yang Disusun	9 Dokumen	109,109,900	Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah	BPKD	Jumlah Regulasi pendapatan daerah yang Disusun	8 Dokumen	228,865,000	
32	Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah	BPKD	Persentase Jumlah Kasus pendapatan Daerah Yang Diselesaikan	85%	65,000,000	Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah	BPKD	Persentase Jumlah Kasus pendapatan Daerah Yang Diselesaikan	85%	65,000,000	
8	Program Perencanaan Keuangan Daerah	BPKD	Waktu Penyusunan Rancangan APBD Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006	7 minggu	760,772,300	Program Perencanaan Keuangan Daerah	BPKD	Waktu Penyusunan Rancangan APBD Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006	7 minggu	982,742,300	

34	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKD	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun	1 Dokumen	233,979,800	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKD	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun	1 Dokumen	266,684,800	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun
35	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang P3enjabaran APBD	BPKD	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun	1 Dokumen	84,651,000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang P3enjabaran APBD	BPKD	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun	1 Dokumen	81,112,500	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun
36	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKD	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun	1 Dokumen	187,342,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKD	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun
37	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	BPKD	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun	1 Dokumen	79,373,000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	BPKD	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun	1 Dokumen	81,112,500	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perda APBD yang Disusun
38	Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana	BPKD	Jumlah surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD yang Diterbitkan	316 Dokumen	20,100,000	Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana	BPKD	Jumlah surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD yang Diterbitkan	316 Dokumen	21,525,000	316 Dokumen	Jumlah surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD yang Diterbitkan
39	Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD	BPKD	Jumlah DPA-DPPA SKPD yang Di Verifikasi	53 Dokumen	12,290,000	Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD	BPKD	Jumlah DPA-DPPA SKPD yang Di Verifikasi	53 Dokumen	10,290,000	53 Dokumen	Jumlah DPA-DPPA SKPD yang Di Verifikasi
41	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	BPKD	Jumlah Regulasi Kebijakan Keuangan Yang disusun (Perbub.SK)	20 Dokumen	55,796,500	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	BPKD	Jumlah Regulasi Kebijakan Keuangan Yang disusun (Perbub.SK)	20 Dokumen	50,000,000	20 Dokumen	Jumlah Regulasi Kebijakan Keuangan Yang disusun (Perbub.SK)
42	Peningkatan Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Jumlah Update Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 paket	87,240,000	Peningkatan Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Jumlah Update Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 paket	30,000,000	1 paket	Jumlah Update Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Laporan Keuangan Yang Di Rekonsiliasi	100%	677,652,000	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	BPKD	Persentase Laporan Keuangan Yang Di Rekonsiliasi	100%	782,290,125	100%	Persentase Laporan Keuangan Yang Di Rekonsiliasi
43	Penyusunan Rancangan	BPKD	Jumlah Dokumen Perda	1 Dokumen	296,587,000	Penyusunan Rancangan	BPKD	Jumlah Dokumen Perda	1 Dokumen	289,928,000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perda

11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Cakupan Persentase BMD yang Di Kelola Dengan Baik	88%	606,491,400	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Persentase BMD yang Di Kelola Dengan Baik	88%	595,306,900	
50	Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase Nilai Barang Milik Daerah Yang Dihapus	85%	154,025,000	Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Barang Milik Daerah Yang Dihapus	85%	137,745,000	
51	Penatausahaan barang Milik Daerah	BPKD	Persentase BMD yang Ditatausahakan dengan Baik	100%	224,359,900	Penatausahaan barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Ditatausahakan dengan Baik	100%	254,555,400	
52	Penyusunan Standar Harga Satuan	BPKD	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Yang Disusun	2 Buku	36,275,000	Penyusunan Standar Harga Satuan	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Yang Disusun	2 Buku	36,275,000	
53	Fasilitasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase Barang Milik Daerah Yang diManfaatkan di Pelihara dan diamankan	93 Persen	191,831,500	Fasilitasi pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang diManfaatkan di Pelihara dan diamankan	93 Persen	166.731,500	
			Jumlah		7,814,757,300		Jumlah		8,061787,900	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen. Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan.

Kebijakan fiska Nasiol tahun 2021 mengangkat tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi." Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan.

Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran

indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut:

- a. pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen;
- b. inflasi 2,0-4,0 persen;
- c. tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen;
- d. nilai tukar Rupiah Rp14.900-Rp15.300/US\$;
- e. harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/barel;
- f. lifting minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan
- g. lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan fokus kepada pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang maka reformasi diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta belanja negara. "Dampak Covid-19 membuka fakta perlunya dilihat kembali pola hubungan Pusat-Daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Realokasi dan refocusing yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di 2020 adalah salah satu bentuk respon positif terhadap anggaran belanja APBN dan APBD masih bisa dikelola dengan lebih baik.

Tahun 2021 menjadi tahun penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 sekaligus momentum yang tepat dalam melakukan reformasi struktural agar perekonomian Indonesia kembali pada tren pertumbuhan. Keberhasilan melakukan langkah-langkah pemulihan dan reformasi menjadi faktor penting yang akan menentukan keberhasilan Indonesia meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa menuju Visi Indonesia Maju 2045.

Tata kelola keuangan daerah yang merupakan entitas dari keuangan negara, dengan Reformasi anggaran belanja akan terus dilakukan melalui penajaman fokus prioritas (zero-based budgeting), beorientasi hasil (result-based budgeting), dan perlu alokasi yang bersifat antisipatif (automatic stabilizer) sebagai shock-absorber otomatis dalam menghadapi ketidakpastian. Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain penetapan target penerimaan yang responsif dan realistis, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan pajak.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan yang akan dicapai dalam renja ini antara lain :

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan/gedung Kantor
- 1.8 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Lainnya
- 1.12 Monitoring dan evaluasi
- 1.13 Kunjungan Kerja Dalam Daerah

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1 Pembangunan Gedung Kantor
- 2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2.4 Pembangunan Taman, Lapangan /Fasilitas Parkir
- 2.5 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- 2.6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
- 2.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

- 3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 3.2 Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 4.1 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
5	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- 5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
6	Program Perencanaan Keuangan Daerah

- 6.1 Penyusunan Analisa Standar Belanja
- 6.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- 6.3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
- 6.4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

- 6.5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 6.6 Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana
- 6.7 Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD
- 6.8 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
- 6.9 Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
7	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

- 7.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 7.2 Penyusunan Rancangan Peraturan kKh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 7.3 Pentausahaan Keuangan Daerah
- 7.4 Penyusunan Neraca dan Pembukuan Keuangan Daerah

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
8	Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

- 8.1 Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
- 8.2 Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 8.3 Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Daerah

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
9	Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

- 9.1 Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 9.2 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
- 9.3 Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah
- 9.4 Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 10.1 Penghapusan Barang Milik Daerah
- 10.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 10.3 Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
- 10.4 Penyusunan Standar Harga Satuan

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2021 (N)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0		Non Urusan						
0								
0								
0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		98%	1,148,088,350			0
0.00.4.34.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim	SKPD	24 Surat	2,052,000	Pendapatan Daerah		0 Surat
0.00.4.34.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda, dan listrik yang terbayarkan	SKPD	60 rekening	282,000,000	Pendapatan Daerah		0 rekening

Rencana Kerja BPKD Kab.Luwu Timur Tahun 2021

0.00.4.34.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	SKPD	2 Orang	33,000,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
0.00.4.34.01.01.07	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	SKPD	72 unit	88,250,000	Pendapatan Daerah	0 unit	0
0.00.4.34.01.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	SKPD	33 Jenis	50,026,600	Pendapatan Daerah	0 Jenis	0
0.00.4.34.01.01.09	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SKPD	3 Jenis	41,580,000	Pendapatan Daerah	0 Jenis	0
0.00.4.34.01.01.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	SKPD	7 Jenis	15,000,000	Pendapatan Daerah	0 Jenis	0
0.00.4.34.01.01.12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang disediakan	SKPD	5,950 Kotak	94,875,000	Pendapatan Daerah	0 Kotak	0
0.00.4.34.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	SKPD	108 Exempler	14,460,000	Pendapatan Daerah	0 Exempler	0
0.00.4.34.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	SKPD	135 Kali	394,779,750	Pendapatan Daerah	0 Kali	0

0.00.4.34.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis			Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis yang terbayarkan	SKPD	13 Orang	96,000,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
0.00.4.34.01.01.21	Monitoring dan Evaluasi			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulan yang disusun	SKPD	4 Dokumen	11,065,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0.00.4.34.01.01.22	Kunjungan kerja dalam daerah			Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	SKPD	229 Kali	25,000,000	Pendapatan Daerah	0 Kali	0
0	0	SKPD		Persentase rata-rata capaian sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		95%	498,100,000		0	
0.00.4.34.01.02.03	Pembangunan gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dibangun	SKPD	2 Unit	0	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
0.00.4.34.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	SKPD	3 Unit	2,400,000	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
0.00.4.34.01.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	SKPD	15 Unit	297,700,000	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
0.00.4.34.01.02.13	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir			Jumlah taman, lapangan/fasilitas parkir yang dibangun	SKPD	2 Unit	0	Pendapatan Daerah	0 Unit	0

0.00.4.34.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah gedung kantor yang dipelihara	SKPD	2 Unit	100,000,000	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
0.00.4.34.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	SKPD	21 Unit	98,000,000	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
0	0	5			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		95%	463,979,500		0	
0.00.4.34.01.05.06	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	SKPD	1 Dokumen	34,338,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0.00.4.34.01.05.08	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun				Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	SKPD	3 Dokumen	429,641,500	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0	0	6			Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu		95%	60,737,000		0	
0.00.4.34.01.06.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD				Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	SKPD	6 Dokumen	60,737,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0

0	0	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	95 Persen	361,290,000			0	
0.00.4.34.01.04.02			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	250 Orang	61,205,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
				Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	0 Kali				0 Kali	
0.00.4.34.01.04.03			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	50 Orang	300,085,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
3										
3	34			Keuangan						
3	34	18	Program Perencanaan Keuangan Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006	7 Minggu	846,987,600			0	
04.34.4.34.01.18.02			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD yang disusun	1 Dokumen	260,724,000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0
04.34.4.34.01.18.03			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran APBD yang disusun	1 Dokumen	79,972,800	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0

04.34.4.34.01.1 8.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda perubahan APBD yang disusun	Kabupaten	1 Dokumen	250,444,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
04.34.4.34.01.1 8.05	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun	Kabupaten	1 Dokumen	64,288,800	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
04.34.4.34.01.1 8.06	Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana	Jumlah surat penyediaan dana SKPD yang diterbitkan	SKPD	300 Dokumen	94,325,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
04.34.4.34.01.1 8.07	Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD	Jumlah DPA-DPPA SKPD yang diverifikasi	SKPD	40 Dokumen	36,930,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
		Jumlah dokumen verifikasi DPA-DPPA		2 Dokumen			0 Dokumen	
04.34.4.34.01.1 8.08	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Anggaran Kebijakan dan Analisis Anggaran APBD	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran kebijakan dan analisis anggaran APBD	SKPD	4 Dokumen	0	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
04.34.4.34.01.1 8.09	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah regulasi kebijakan keuangan yang disusun	SKPD	8 Dokumen	60,303,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
04.34.4.34.01.1 8.11	Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengadaan aplikasi keuangan yang dilaksanakan	SKPD	2 Paket	0	Pendapatan Daerah	0 Paket	0

					Jumlah Update Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		3 Kali				0 Kali	
3	34	19			Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang di rekonsiliasi	100 Persen	979,712,650			0	
	04.34.4.34.01.1	9.01			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	305,532,000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0
						Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	2 Dokumen				0 Dokumen	
	04.34.4.34.01.1	9.02			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	155,170,000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0
	04.34.4.34.01.1	9.03			Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah SPM yang diverifikasi dan Jumlah SP2D yang diterbitkan	15.000 Dokumen	390,277,150	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0
	04.34.4.34.01.1	9.04			Penyusunan Neraca dan Pembukuan Keuangan Daerah	Jumlah neraca dan pembukuan keuangan daerah yang disusun	14 Dokumen	128,733,500	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0

3	34	20			Cakupan persentase Peningkatan Pendapatan asli daerah	95%	668,084,600		0	
	04.34.4.34.01.2	0.01		Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata	SKPD	95 Wajib pajak baru	Pendapatan Daerah	0 Wajib pajak baru	0
	04.34.4.34.01.2	0.02		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib Pajak daerah (Non PBB) yang ditetapkan	SKPD	90 Wajib pajak baru	Pendapatan Daerah	0 Wajib pajak baru	0
	04.34.4.34.01.2	0.03		Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah rekonsiliasi Pendapatan daerah yang dilakukan pada OPD pengelola PAD	SKPD	252 Dokumen	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Pendapatan Daerah		12 Dokumen		0 Dokumen	
3	34	21			Persentase jumlah penerimaan daerah yang dihasilkan		97%	2,143,540,400	0	
	04.34.4.34.01.2	1.01		Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah objek pajak PBB P2 yang ditetapkan	SKPD	142.661 Objek pajak	Pendapatan Daerah	0 Objek pajak	0

04.34.4.34.01.2 1.02	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah			Persentase pendistribusian anggaran yang bersumber dari pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah ke dalam dokumen DPA	SKPD	97 Persen	476,349,700	Pendapatan Daerah	0 Persen	0
	04.34.4.34.01.2 1.03			Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah	SKPD	9 Dokumen	208,700,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
	04.34.4.34.01.2 1.04			Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah	SKPD	85 Persen	70,521,000	Pendapatan Daerah	0 Persen	0
3	34	22				90%	645,371,000		0	
04.34.4.34.01.2 2.01				Cakupan Persentase BMD yang dikelola dengan baik						
04.34.4.34.01.2 2.01				Penghapusan Barang Milik Daerah	SKPD	90 Persen	255,165,000	Pendapatan Daerah	0 Persen	0
04.34.4.34.01.2 2.02				Penatausahaan Barang Milik Daerah	SKPD	100 Persen	258,292,000	Pendapatan Daerah	0 Persen	0
04.34.4.34.01.2 2.03				Penyusunan Standar Harga Satuan	SKPD	2 Buku	32,205,000	Pendapatan Daerah	0 Buku	0

04.34.4.34.01.2 2.04	Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah		Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan, dipelihara dan diamankan	SKPD	93 Persen	99,709,000	Pendapatan Daerah	0 Persen	0
				TOTAL			7,815,891,100		0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 10 program dan 44 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 7,815,891,100,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan BPKD

	PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2021 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	1,148,088,350	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Surat	2,052,000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Rekening	282,000,000	APBD
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2 Orang	33,000,000	APBD
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	72 Unit	88,250,000	APBD
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33 Jenis	50,026,600	APBD
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	41,580,000	APBD
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	15,000,000	APBD
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	108 Eksemplar	14,460,000	APBD
9	Penyediaan makanan dan minuman	5950 Kotak	94,875,000	APBD
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135 Kali	394,779,750	APBD
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	13 Orang	96,000,000	APBD
12	Kunjungan kerja dalam daerah	229 Kali	25,000,000	APBD
13	Monitoring dan evaluasi	4 Dokumen	9,000,000	APBD

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	498,100,000	APBD
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit	2,400,000	APBD
15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	297,700,000	APBD
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Unit	100,000,000	APBD
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21 Unit	98,000,000	APBD
3	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	95%	60,737,000	APBD
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6 Dokumen	60,737,000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	93%	361,290,000	APBD
19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Peserta	61,205,000	APBD
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	300,085,000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95%	463,979,500	APBD
21	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	34,338,000	APBD
22	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	3 Dokumen	429,641,500	APBD
6	Program Perencanaan Keuangan Daerah	7 minggu	846,987,600	APBD
23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen	260,724,000	APBD
24	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	79,972,800	APBD
25	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	250,444,000	APBD
26	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	64,288,800	APBD
27	Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana	300 Dokumen	94,325,000	APBD
28	Pengelolaan Dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD	40 Dokumen	36,930,000	APBD
29	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	8 Dokumen	60,303,000	APBD
7	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100%	979,712,650	APBD
30	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	305,532,000	APBD
31	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	155,170,000	APBD
32	Penatausahaan Keuangan Daerah	15,000 Dokumen	390,277,150	APBD

33	Penyusunan Neraca dan Pembukuan Keuangan Daerah	14 Dokumen	128,733,500	APBD
8	Program Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	95%	668,084,600	APBD
34	Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	95 Wajib Pajak Baru	144,158,050	APBD
35	Penetapan Wajib Pajak Daerah	90 Wajib Pajak Baru	312,099,050	APBD
36	Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Daerah	252 Dokumen	211,827,500	APBD
9	Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	97%	2,143,540,400	APBD
37	Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan perkotaan (PBB P2)	142.661 Objek pajak	1,387,969,700	APBD
38	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah	97%	476,349,700	APBD
39	Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah	9 Dokumen	208,700,000	APBD
40	Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah	85%	70,521,000	APBD
10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	645,371,000	APBD
41	Penghapusan Barang Milik Daerah	90%	255,165,000	APBD
42	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	258,292,000	APBD
43	Penyusunan Standar Harga Satuan	2 Buku	32,205,000	APBD
43	Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	90 Dokumen	99,709,000	APBD
	JUMLAH		7,815,891,100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ini merupakan bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mewujudkan visi **"Luwu Timur Terkemuka 2021"**

Rencana Kerja ini didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Visi Pemerintah Daerah yang tertuang pada RPJMD dan di jabarkan pada Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Program dan Kegiatan tahunan, untuk menjadi pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Disamping itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat mengatur arah perkembangannya dalam pencapaian hasil yang diharapkan selain dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Malili, Mei 2020

Kepala BPKD

Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E.,M.M

Pkt : Pembina Tk I

Nip : 19700814 200212 1 006

TABEL LAMPIRAN RENJA 2021
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	50,299,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	10,438,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	34,338,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,065,000
	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,683,000
	Administrasi Keuangan	Penyediaan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	204,116,000
	Administrasi Keuangan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	166,483,000
	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,814,000
	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	17,788,500
	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9,757,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,052,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282,000,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24,000,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33,000,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	88,250,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,026,600
	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,580,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,460,000
	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	94,875,000
	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	442,010,000
	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16,169,250

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	297,700,000
	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	136,000,000
	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	98,000,000
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	61,205,500
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	300,085,000
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Waktu penyusunan rancangan APBD sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	299,972,800
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	274,288,800
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Regulasi Anggaran	60,303,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	17,905,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	19,025,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan KUA dan PPAS	40,724,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan	40,444,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	94,325,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	55,140,100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	8,702,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas	102,666,650
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	130,641,650
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	20,350,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	155,170,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	305,532,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Lapran Keuangan Pemda	88,095,000

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Rapat Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : AINUDDIN, S.ST. M.Si
 NIP : 19691225 199403 1 008
 Jabatan : Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 Alamat : Bapelitbangda, Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Bapelitbangda, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Dr. RAMADHAN PIRADE, SE,MM
 NIP : 19700814 200212 1 006
 Jabatan : Kepala BPKD
 Alamat : Malili

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sesuai dengan pencermatan terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah dan format pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, sebagaimana hal tersebut telah disampaikan oleh Pihak Kedua dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini, kedua belah pihak selanjutnya bersepakat terhadap hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Beberapa Masukan Terkait Renja 2021 di antaranya dari :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

- Renja BPKD/BAPENDA belum bisa berdiri sendiri setelah pelantikan bupati di tahun 2021 karena mengingat pelantikan bupati sesuai masa jabatannya baru dapat dilaksanakan pada bulan Februari 2021 berarti enam bulan kemudian bupati baru bisa melantik setelah RPJMD ditetapkan, sehingga jabatan kepala bidang masing-masing masih melekat di BPKD dan kemungkinan pada perubahan baru bisa dikeluarkan dan berdiri sendiri anggarannya. Hanya yang perlu untuk dipersiapkan lebih awal diperubahan adalah administrasi perkantoran/sekretariatannya. Mengingat lembaganya telah terbentuk sehingga tinggal menyusun tufoksinya masing-masing.
- Terkait hibah bansos tidak lagi di BPKD
- Menekankan nomenkelatur harus sama terkait permen 90 tahun 2019
- Terkait KP1 harus selesai di february 2020 plus 2 bulan sehingga pada masa transisi tidak ada lagi KP1 di tahun 2021.
- Dalam menentukan hal-hal prioritas perlu berhati-hati dengan menyesuaikan dana yang tersedia dan juga perlu di pikirkan yaitu daya ungkit pendapatan daerah karena pertumbuhan ekonomi luwu timur turun di posisi 1.17%.
- Program mengikuti anggaran bukan anggaran mengikuti program..

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Perencanaan , pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	211,827,500
Total			7,815,891,100

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	40,638,500
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	72,776,750
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	32,205,000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan BMD	26,023,000
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	54,343,000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	19,343,000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	11,135,000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	35,973,000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	67,895,000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	89,007,500
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	61,557,500
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	36,705,000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	72,432,000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	138,752,000
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Perencanaan , pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	476,349,700
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Perencanaan , pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	208,700,000
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Perencanaan , pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi	70,521,000
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Perencanaan , pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak daerah dan Retribusi Daerah	1,387,969,700
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Perencanaan , pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	144,158,050
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Perencanaan , pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah	312,099,050

2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- Renja 2021 tentang pemisahan Badan apakah anggarannya akan dibuatkan khusus atau bagaimana.
- Dana hibah yg di persiapkan oleh BPKD yaitu 16 dan harus di bagi secara merata.
- Untuk PPAS akan ada di adakan rapat tersendiri.
- Jika OPD ingin menambah anggaran maka OPD yang terkait harus mampu menjelaskan hal apa yang menjadi dasar/ alasan untuk penambahan tersebut.
- Bapelitbangda perlu mengawasi terkait pokir dewan dan infrastruktur desa, masih ada 37 desa yang belum masuk kegiatan fisiknya sehingga akan lebih difokuskan penyelesaiannya terkait hal ini.

3. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Penyusunan renja bukan hanya tugas kasubag perencana tetapi semua bidang terlibat sehingga di buatkan SK tim Penyusunan Renja.
- Melakukan rasionalisasi pagu renja akhir tahun 2021 sebesar 10% dari renja awal tahun 2021 karena asumsi pendapatan mengalami penurunan dari 1.5 Triliun menjadi 1,4 Triliun dari hasil rapat Tim TAPD.
- Dalam penyusunan isi renja BPKD harus berbicara tentang *BPKD* itu sendiri seperti Prioritas target OPD harus memandang dirinya sendiri tidak boleh memandang secara global seperti WTP bukan target orang keuangan saja tetapi semua OPD dan menjadi fokus BPKD itu sendiri.

4. Kasubid Perencanaan dan Pendanaan

- Bagaimana dengan status BPKD yang masih menggunakan SIMDA sedangkan Propinsi berharap 1 platform satu data satu system menggunakan permen 90 tahun 2019.
- BPKD harus berkerja manual terkait penyusunan struktur APBD berdasarkan permen 90 tahun 2019 sehingga kemungkin akan terkendala dipenyusunan RKPD di BAB 3.

5. Kabid Anggaran

- RKA badan BPKD bukan hanya mencakup APBD secara dinas tetapi APBD secara kabupaten.
- Badan berfungsi koordinasi dan Dinas bersifat teknis.

6. Fungsional perencana :

- Terkait sistematika penulisan di jelaskan pada tabel terlampir.

7. Kasubid Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur.

- Setiap SKPD untuk pagu anggaran harus berkurang 10%
- Hasil verifikasi pokir, terdapat perbedaan jumlah pagu yaitu jumlahnya lebih besar dan kecil dan bahkan ada yang tidak ada sehingga perlu di bahas tersendiri terkait hal ini.

KEDUA : Untuk Bab II terkait Analisis Kinerja agar melengkapi semua capaian data baik IKU, IKK, SPM maupun data Indikator yang ada pada Permendagri 86 Tahun 2017.

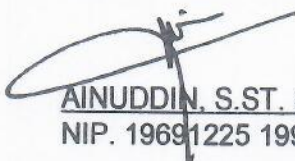
KETIGA : Melakukan penyempurnaan rancangan Renja Akhir Tahun 2021 berdasarkan hasil Evaluasi meliputi :

1. Penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim Evaluasi sebagaimana tersebut pada formulir Evaluasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. Penyempurnaan matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 melalui E-Planning.
3. Melakukan penyesuaian pagu dengan memprioritaskan kegiatan yang mendukung Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021,

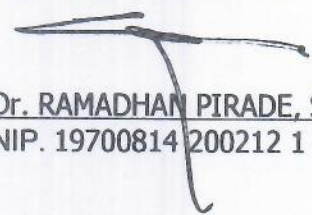
KEEMPAT : Menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur paling lambat cq. Bidang Perekonomian paling lambat Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator Tim Evaluasi
Bapelitbangda Kab. Luwu Timur


AINUDDIN, S.ST. M.Si
NIP. 19691225 199403 1 008

Tim Penyusun Renja OPD
Kabupaten Luwu Timur


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE,MM
NIP. 19700814 200212 1 006

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2021**

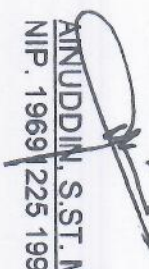
No.	Aspek Pemeriksaan	Penjelasan Hasil Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan
1.	Format E.70	Form Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah telah diserahkan	- Dicek list sesuai tahapan yang telah dilakukan ketersediaan dokumen (lampirkan SK Tim Penyusunan Renja dan Tahapan Agenda Kerja) - Tahapan penyusunan Renja : Rancangan awal (1-6), rancangan (7-10), rancangan akhir (10.a-13), Penetapan (4)
2.	Penyajian Daftar Isi	-	- Sistematika menyesuaikan Permendagri 86/2017 (C.5 Penyajiandokumen Renja. Hal 399-407) - Pada daftar isi belum dicantumkan Bab II sub Bab 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Bab III sub Bab 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.	Keterkaitan antar BAB Permendagri 86/2017		
	BAB I PENDAHULUAN		
	1.1 Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPd, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	- Sudah memuat pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPd, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
	1.2 Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan	- Masih ada Dasar Hukum yang sudah tidak berlaku namun masih disajikan sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan yang terbaru - Direkomendasikan yang belum termuat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali

		penganggaran Perangkat Daerah	terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4); - Tambahkan peraturan sesuai kewenangan masing-masing OPD
	1.3 Maksud dan Tujuan	-	- Telah menjelaskan maksud dan tujuan terhadap penyusunan dokumen
	1.4 Sistematika Penulisan	-	- Uraikan sistematika penulisan Bab per Bab beserta Sub Bab Sesuai dengan sistematika Permendagri 86/2017
	BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PD TAHUN LALU		
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD	Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)	- Sesuaikan dengan sistematika Permendagri 86/2017 sesuai Tabel T-C.29 Pelaksanaan (Tampilkan Judul Tabel Rekapitulasi Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja dan Renstra s/d Tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur) Nama OPD bukan dalam tabel.
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan	- Sub Bab 2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja (Hal. 17) dan 2.1.2 Capaian Analisis Kinerja (Hal.) Masukkan ke dalam Penjelasan pada sub bab 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

		dalam NSPK dan Si-ri, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.	- Perangkat Daerah (tal.19) - Sudah Menampilkan Beberapa capaian sesuai Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah - Sesuaikan dengan tabel T-C.30 terkait Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang disajikan (urutkan Mulai IKU sampai Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Keuangan Permendagri 86 tahun 2017)
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	Berisikan uraian mengenai: - Sejahter mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; - Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; - Tantangan dan peluang; - Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	- Pada Sub ini sekurang-kurangnya menjelaskan Sejahter mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta Tantangan dan peluang. - Masukkan perubahan Kelembagaan (Bidang Pendapatan) sebagai isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi - Isu terkait penyebaran Virus Covid 19 dalam bidang urusan Keuangan perlu sedikit diulas	
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	Membandingkan rancangan awal Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan	- Penyajian Telah sesuai Tabel T-C.31 Permendagri 86 tahun 2017 - Periksa kesesuaian di Renstra dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (lihat juga pada e-planning)	
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat (Musrenbang) maupun Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).	- Sub Bab ini tetap disajikan Meskipun sulan baik Musrenbang maupun Pokok Pikiran tidak ada tetap dinarasikan bahwa usulan ke Perangkat daerah tidak ada (untuk memastikan Periksa pada Eplanning)	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	- Sesuaikan sistematika penulisan pada bab III judul 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional - Lihat RKPd 2021 Bab. IV (sesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah) - Lihat kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (Rencana Kerja Kementerian maupun Permendagri Nomor 40 Tahun 2020)
3.2 tujuan dan sasaran renja PD	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	- Sesuaikan sistematika penulisan pada bab III judul 3.2 tujuan dan sasaran renja PD - Telah menggambarkan tujuan dan sasaran namun belum disajikan target kinerja sesuai Renstra Perangkat Daerah
3.3 program dan kegiatan	Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	- Sesuaikan sistematika penulisan pada bab III judul 3.3 program dan kegiatan - Penjelasan Tabel sesuaikan T-C.33 Permendagri 86 Tahun 2017 (Kolom 4 Indikator Kinerja Program/Kegiatan harusnya menjadi kolom 3 begitupun juga kolom Lokasi harusnya menjadi Kolom 4)
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Menggambarakan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah	- Judul Tabel Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah (untuk Memperhatikan Penomoran tabel) - Lampirkan Program Kegiatan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini
BAB V. PENUTUP	Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.	- Pada Bab V Uraikan juga yang menjadi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut - Rancangan akhir yang telah disempurnakan Kembali diserahkan ke Bapelitbangda, selanjutnya karna ditetapkan

		c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan	dengan perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkada RKPD 2021 ditetapkan
--	--	---	---

Malili, 22 Juni 2020
Koordinator Tim Evaluasi

ANUDDIN, S.S.T. M.Si
NIP. 19691225 199403 1 008